

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Acara Pidana

A.1. Pengertian Hukum Acara Pidana

Hukum Acara Pidana sering disebut juga dengan hukum pidana formil sedangkan hukum pidana disebut dengan hukum materiil. Hukum pidana materiil atau hukum pidana itu berisi petunjuk dan uraian tentang delik peraturan tentang syarat-syarat dapat dipidananya suatu perbuatan, petunjuk tentang orang dapat dipidana dan atauran tentang pemidanaan yaitu mengatur kepada siapa dan bagaimana pidana itu dapat dijatuhkan, sedangkan Hukum Acara Formil mengatur bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidanakan dan menjatuhkan pidana.¹³

Pengertian Hukum Acara Pidana tidak secara jelas di definisikan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana hanya memberikan pengertian – pengertian mengenai bagian-bagian dari hukum acara pidana, seperti penyelidikan, penyidikan, penangkapan, upaya hukum, penyitaan, penggeledahan dan lain-lain.

Untuk mengetahui lebih jauh tentang definisi Hukum Acara Pidana, maka dibawah ini ada beberapa definisi menurut pandangan para sarjana, diantaranya adalah :

¹³Andi Hamzah, 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika. Jakarta. hal. 264

1. D. Simons

“Hukum Acara Pidana bertugas mengatur cara-cara negara dengan alat perlengkapannya mempergunakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana.”¹⁴

2. J. de Bosch kemper

“Hukum Acara Pidana adalah sejumlah asas-asas dan peraturan-peraturan undang-undang yang mengatur hak Negara untuk menghukum bilamana undang-undang pidana dilanggar.”¹⁵

3. R. Soesilo

“Hukum Acara Pidana adalah hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan atau menyelenggarakan hukum pidana materiil, sehingga memperoleh keputusan hakim dan cara bagaimana isi putus itu harus dilakukan”.¹⁶

Sedangkan menurut **Van Bemmelen** seperti yang dikutip **Andi Hamzah** mengatakan bahwa pengertian Hukum Acara Pidana adalah Ilmu yang mempelajari peraturan-peraturan yang diciptakan negara, karena adanya dugaan terjadi pelanggaran Undang-Undang pidana, yang melingkupi sebagai berikut :

1. Negara melalui alat-alatnya menyidik kebenaran.
2. Sedapat mungkin menyidik pelaku pelaku perbuatan itu.
3. Mengambil tindakan-tindakan yang perlu guna menangkap si pembuat dan kalau perlu menahannya.
4. Mengumpulkan bahan-bahan bukti (*bewijsmateriaal*) yang telah diperoleh pada penyidikan kebenaran guna dilimpahkan kepada hakim dan membawa terdakwa ke depan hakim tersebut.
5. Hakim memberikan keputusan tentang terbukti tidaknya perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa dan untuk itu menjatuhkan pidana atau tindakan tata tertib.
6. Upaya hukum untuk melawan keputusan tersebut.

¹⁴ Suryono Sutarto, 1987. *Sari Hukum Acara Pidana I*, Yayasan Cendikia Purna Dharma. Semarang 1987. Hal. 5

¹⁵ *Ibid*, Hal. 5

¹⁶ R. Soesilo, 1982. *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP Bagi Penegak Hukum)*, Politeria. Bogor. Hal.3.

7. Akhirnya melaksanakan keputusan tentang pidana dan tindakan tata tertib.¹⁷

Berdasarkan pengertian diatas, penulis menyimpulkan bahwa definisi yang diberikan oleh Van Bemmelen dapat dikatakan lebih lengkap dan tepat karena dalam definisi tersebut merinci pula substitusi hukum pidana seperti disebutkannya tahap penyelidikan, tahap penyidikan, tahap penuntutan, sampai pada proses dipengadilan. jadi bukan permulaan dan akhir saja.

Pengertian hukum acara pidana sebagaimana dikemukakan oleh para sarjana diatas pada hakekatnya mempunyai paham yang sama mengenai definisi hukum acara pidana yakni sebagai aturan-aturan tentang tata cara penyelenggaraan peradilan pidana dimana subjek Hukum Acara Pidana adalah masyarakat dalam arti luas tidak ketinggalan pula para penegak hukum di dalamnya. Sudah seharusnya pula bahwa aturan dalam Hukum Acara Pidana itu tidak hanya ditujukan kepada aparat penegak hukum saja tetapi juga ditujukan kepada pihak-pihak atau orang lain yang terlibat didalamnya baik secara langsung maupun tidak langsung.

A.2. Tujuan Hukum Acara Pidana

Suatu peraturan hukum pastinya mempunyai tujuan yang nantinya hendak ingin dicapai. Apabila suatu peraturan hukum dibuat tanpa adanya suatu tujuan maka tidak akan memiliki nilai guna atau manfaat, begitu juga

¹⁷ Andi Hamzah, 1986. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana*, Ghalia Indonesia. Jakarta. Hal. 16.

sebaliknya apabila sebuah peraturan hukum itu di buat untuk suatu tujuan maka akan memiliki suatu nilai guna yang nantinya akan berguna dalam pelaksanaannya, semakin baik tujuan yang hendak dicapai maka semakin bernilai dan semakin ditaati peraturan tersebut oleh masyarakat untuk terciptanya keadilan.

Tujuan Hukum Acara Pidana menurut **Suryono Sutarto** adalah :

“Untuk mencari dan menemukan kebenaran material ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan-ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapa pelaku yang dapat didakwakan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya minta pemeriksaan dan putusan pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindakan-tindakan pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwakan itu dapat dipersalahkan”.¹⁸

Tujuan Hukum Acara Pidana memang pada hakekatnya mencari kebenaran dan mendapatkan kebenaran dari suatu perkara pidana sesuai dengan apa yang dikemukakan para sarjana sebelumnya tentang pengertian hukum pidana. Para penegak hukum mulai dari Polisi, Jaksa sampai pada Hakim dalam menyidik, menuntut dan mengadili perkara senantiasa harus berdasar kebenaran dan harus berdasarkan hal-hal yang sungguh-sungguh terjadi, para penegak hukum dituntut untuk memahami prosedur hukum acara pidana guna menyelesaikan permasalahan hukum khususnya pidana yang semata-mata bertujuan untuk mencari kebenaran materiil.

¹⁸ Suryono Sutarto, *Op.Cit*, Hal 10

Apabila dikaitan dengan kesaksian yang dibacakan di muka persidangan aparat penegak hukum khususnya hakim dituntut untuk mengetahui alasan-alasan yang sangat terbatas dari saksi yang tidak dapat hadir dan kesaksiannya dibacakan guna menyelesaikan permasalahan hukum pidana dan juga bertujuan untuk melindungi korban dan terdakwa untuk mencari kebenaran materiil tanpa waktu yang lama dan hemat biaya sesuai dengan asas hukum acara pidana.

Pelaksanaannya para penegak hukum tidak hanya mengejar tujuan awalnya saja untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materiil tetapi juga harus terpenuhinya tujuan akhirnya yaitu untuk mencapai suatu keadilan, kemanfaatan, ketertiban dan kepastian hukum. Para penegak hukum yang berpengalaman sesuai bidangnya dituntut juga untuk memahami prosedur hukum acara pidana guna menyelesaikan permasalahan hukum khususnya pidana yang semata-mata bertujuan untuk mencari kebenaran materiil.

A. 3. Asas-asas Hukum Acara Pidana

Didalam Kitab Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terdapat asas-asas atau prinsip-prinsip yang menjadi patokan hukum untuk mengatur perlindungan terhadap harkat martabat manusia sekagilus merupakan pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan pasal-pasal KUHAP baik pada waktu pemeriksaan permulaan maupun pada waktu persidangan pengadilan .

Asas-asas penting yang terdapat dalam Hukum Acara Pidana. Yaitu :

1. Asas Semua Orang Diperlakukan Sama di depan Hukum (Equality Before the Law)

Asas semua orang diperlakukan sama didepan hukum maksudnya adalah hukum tidak boleh membedakan siapapun semua mempunyai hak dan kewajiban baik tersangka maupun penegak hukum.

Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa asas persamaan dimuka hakim tidak secara eksplisit tertang dalam KUHAP, Akan Tetapi asas ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari KUHAP. Ditempatkannya asas ini sebagai satu kesatuan menunjukan bahwa betapa pentingnya asas ini dalam tata kehidupan Hukum Acara Pidana Indonesia.

Asas yang umum dianut di negara-negara yang berdasarkan hukum ini terdapat dalam pasal 5 ayat (1) Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman Nomor 8 Tahun 1981 dijelaskan bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang dan penjelasan umum butir 3a Kitab Undang-undang Hukum Pidana dijelaskan bahwa perlakuan yang sama atas diri setiap orang dimuka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan perlakuan baik tersangkanya ataupun jabatan dalam melakukan pemeriksaan.

Dari penjelasan kedua pasal diatas dapat penulis menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan pemeriksaan dalam pengadilan sangat tidak dianjurkan terjadinya perbedaan- perbedaan antara terdakwa, saksi,

jaksa, polisi, para pejabat seperti bupati, gubernur bahkan sampai presiden sekalipun. Semua harus dianggap sama di depan hukum dan hakim, semua harus melalui proses yang sama dalam pemeriksaan dan mereka juga sama-sama memiliki hak dan kewajiban yang sama pula pada pemeriksaan pengadilan. Berkaitan dengan kesakisan yang dibacara di muka persidangan hakim tidak boleh membedakan antara keterangan saksi yang hadir dan keterangannya dikemukakan dalam persidangan dengan saksi yang tidak hadir yang keterangannya dibacakan yangmana untuk melindungi kepentingan korban dan terdakwa.

2. Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan

Asas ini terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang kekuasaan kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 bahwa Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sehingga tidak menghabiskan anggaran Negara terlalu besar dan tidak memberatkan pada pihak yang berperkara.

Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dalam penjelasan umum butir 3e dirumuskan bahwa:

“peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkna secara konsenuen dama seluruh tingkat peradilan”

Penjelasan umum tersebut dijabarkan dalam banyak pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu pada pasal-pasal 24 ayat (4), 25 ayat (4), 26 ayat (4), 27 ayat (4), 28 ayat (4). Umumnya dalam pasal-pasal tersebut dimuat ketentuan bahwa jika telah lewat waktu penahanan seperti tercantum dalam ayat sebelumnya, maka penyidik, penuntut umum dan hakim harus sudah mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari tahanan demi hukum. Hal ini mendorong penyidik, penuntut umum dan hakim untuk mempercepat penyelesaian perkara tersebut.

Pasal 50 juga menatur tentang hak tersangka dan terdakwa untuk “segera” diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu dimuali pemeriksaan, ayat (1) , segera perkaranya diajukan ke pengadilan oleh penuntut umum, ayat (2), segera diadili oleh pengadilan, ayat (3).

Pasal 102 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana juga mengatakan penyidik yang menerima laporan atas pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindakan pidana wajib “segera” melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan. Selain bagi penyidik berlaku juga bagi penyidik dalam hal yang sama, penyidik juga harus

segera menyerahkan hasil penyidikan kepada penuntut umum. Penuntut umum menurut pasal 140 ayat (1) Undang-undang Nomo 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana diperintahkan untuk secepatnya membuat sarat dakwaan

Dari pasal-pasal tersebut dapat diketahui bahwa KUHAP menghendaki peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan. Menurut

M. Yahya Harahap bahwa :

“Idealisme penegakkan hukum yang dimiliki aparat penegak hukum yang paling menentukan, karena dengan dukungan idealism yang kuat, aparat penegak hukum memahami kedudukan mereka bukan semata-mata “alat kekuasaan”, tetapi kelompok “manusia pelayan” atau *agency of service*. Kesadaran *agency of service* yang dapat menggugah mereka melaksanakan pelayanan hukum yang cepat, tepat, dan sederhana”.¹⁹

Peradilan dituntut agar tidak bertele-tele dan berbelit-belit, apalagi jika kelambatan penyelesaian kasus peristiwa pidana itu disengaja, sudah barang tentu kesengajaan yang seperti itu merupakan perkosaan terhadap hukum dan martabat manusia. Betapa susahny seorang tersangka atau terdakwa diombang-ambing oleh rasa ketidakpastian yang berlarut-larut disebabkan sangkaan atau dakwaan yang dituduhkan kepadanya berkelamaan menghantui dirinya tanpa suatu penyelesaian akhir.

¹⁹ *Ibid*, Hal 53

Berdasarkan penjelasan diatas, menurut hemat penulis kesaksian yang dibacakan karena saksi tidak hadir dan dipanggil karena tempat kediamannya yang jauh atau tidak dapat hadir karena kepentingan negara atau alasan-alasan lain sesuai dengan pasal 162 ayat 1 dapat membantu mempercepat mendapatkan kebenaran materiil. Persidangan tidak perlu terus ditunda karena saksi berhalangan hadir, selain itu dengan membacakan keterangan saksi yang tidak dapat hadir dapat mempersingkat proses peradilan karena tidak memakan waktu untuk mendatangkan saksi atau menunggu kesediaan saksi.

3. Tersangka atau Terdakwa Berhak Mendapatkan Bantuan Hukum.

Pada asas ini diatur dalam Pasal 69 sampai dengan Pasal 74 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diatur mengenai Bantuan Hukum, dimana tersangka atau terdakwa mendapat kebebasan yang sangat luas.

Menurut M. Yahya Harahap :

- a. Bantuan hukum dapat diberikan sejak saat tersangka/terdakwa ditangkap atau ditahan.
- b. Bantuan hukum dapat diberikan pada semua tingkat pemeriksaan.
- c. Penasehat hukum dapat menghubungi tersangka/terdakwa pada semua tingkat pemeriksaan dan pada setiap waktu.
- d. Penyidik dan penuntut umum tidak mendengarkan pembicaraan antara penasehat hukum dan tersangka kecuali pada perkara/kejahatan terhadap keamanan negara.
- e. Tersangka atau penasehat hukum berhak mendapat turunan berita guna kepentingan pembelaan.

- f. Penasehat hukum berhak mengirim dan menerima surat dari tersangka/ terdakwa.²⁰

Dari kutipan diatas menurut hemat penulis bantuan hukum yang dimaksud adalah bantuan yang diberikan oleh advokat / pengacara mulai dari tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan. Bantuan hukum tersebut berupa konsultasi hukum, pendampingan, membela dalam rangka kepentingan tersangka atau terdakwa selama proses pemeriksaan baik di penyidikan maupun di persidangan begitu pula dengan terdakwa yang pada keterangan saksinya dibacakan, apabila terdakwa keberatan atas keterangan tersebut maka advokat atau penasehat hukum dapat membantu terdakwa.

4. Asas Peradilan Terbuka untuk Umum.

Asas Peradilan terbuka untuk umum ialah asas yang memerintahkan bahwa dalam tahap pemeriksaan, pengadilan terbuka untuk umum maksudnya yaitu boleh disaksikan dan diikuti oleh siapapun, kecuali dalam perkara yang menyangkut kesusilaan dan perkara yang terdakwa anak-anak.

Asas ini terdapat dalam pasal 153 ayat (3) dan (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Pada pasal 153 ayat (3) yaitu bahwa untuk keperluan

²⁰ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.* Hal 21.

pemeriksaan hakim ketua sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak-anak sedangkan pada pasal 153 ayat (4) bahwa ada pengecualian dalam ketentuan ini yaitu sepanjang mengenai perkara yang menyangkut kesusilaan atau terdakwa adalah anak-anak, yang dalam hal ini persidangan dapat dilakukan dengan pintu tertutup.

Dalam hal ini adanya pengecualian tentang peradilan terbuka untuk umum yaitu perkara yang menyangkut tentang kesusilaan dan anak yang duduk sebagai terdakwa, jadi dalam hal ini tidak semua perkara pidana dapat terbuka untuk umum.

Menurut Mohammad Taufik Makarao dan Suhasri

“Pengecualian terhadap kesusilaan dan anak-anak alasannya karena kesusilaan dianggap masalahnya sangat pribadi sekali. Tidak patut untuk mengungkapkan dan memaparkan secara terbuka di muka umum. Begitu juga dengan anak-anak, melakukan kejahatan karena kenakalan”.²¹

Asas terbuka untuk umum ini bertujuan agar terjaminnya objektivitas peradilan dan tujuannya memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi terdakwa. Maka dari itu kesaksian yang dibacakan harus di lihat oleh masyarakat agar dapat mengawasi apabila terjadi penyalahgunaan

²¹ Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, 2010. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia. Hal,9.

dari kesaksian yang dibacakan terkecuali pada sidang kesusilaan dan tindak pidana anak.

5. Pemeriksaan Hakim Yang Langsung dan Lisan

Ketentuan mengenai pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan diatur dalam Pasal 154 dan Pasal 155 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan oleh hakim secara langsung, artinya langsung kepada terdakwa dan para saksi. Berbeda dengan acara perdata, dimana tergugat dapat diwakili oleh kuasanya. Pemeriksaan juga dilakukan secara lisan artinya bukan tertulis antara hakim dan terdakwa.

Pengecualian yang dipandang dari asas langsung ialah kemungkinan putusan dijatuhkan tanpa hadirnya terdakwa, yaitu putusan *verstek* atau *in absentia*. Tetapi, ini hanya merupakan pengecualian, yaitu dalam acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan yaitu Pasal 213 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi: “Terdakwa dapat menunjuk seseorang dengan surat untuk mewakili di sidang”.²²

“Pasal 153 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menegaskan ketua sidang dalam memimpin sidang pengadilan, dilakukan secara langsung dan lisan. Tidak boleh pemeriksaan dengan perantaraan tulisan baik terhadap terdakwa maupun saksi-saksi. Kecuali bagi mereka yang bisu atau tuli, pertanyaan dan jawaban dapat dilakukan secara tertulis. Prinsip pemeriksaan dalam persidangan dilakukan secara langsung berhadapan-hadapan dalam ruang sidang. Semua pertanyaan diajukan dengan lisan dan jawaban atau keteranganpun disampaikan dengan lisan, tiada lain untuk memenuhi tujuan agar persidangan benar-benar menemukan kebenaran yang hakiki. Sebab dari pemeriksaan secara langsung dan

²² *Ibid.* Hal 25.

lisan, tidak hanya keterangan terdakwa atau saksi saja yang dapat didengar dan diteliti, tetapi sikap dan cara mereka memberikan keterangan dapat menentukan isi dan nilai keterangan".²³

Pemeriksaan di sidangn pengadilan dilakukan oleh hakim secara langsung, artinya langsung kepada terdakwa dan para saksi sedangkan pemeriksaan dilakukan secara lisan, artinya bukan tertulis antara hakim dan terdakwa. Pengecualian dari asas langsung adalah kemungkinan putusan dijatuhkan tanpa hadirnya terdakwa yaitu putusan *verstek* atau *in absentia*.

Menurut **Bambang Pernomo** :

“pemeriksaan perkara pidana antara para pihak yang terlibat dalam persidangan harus dilakukan tidak secara tertulis tetapi harus dengan lisan atau satu sama lain agar dapat diperoleh keterangan yang benar dari yang bersangkutan tanpa tekanan dari pihak manapun. Tata cara pemeriksaan perkara pidana dengan mendengar keterangan langsung adalah memberikan kesempatan terutama kepada terdakwa untuk mengeluarkan pendapat atau jika perlu memberikan keterangan ingkar karena pada waktu pemeriksaan tidak bebas keterangan yang diperiksa secara tertutup.”²⁴

Berdasarkan kutipan diatas, penulis menyimpulkan bahwa asas ini tidak sesuai dengan pasal 162 ayat 1 dijelaskan bahwa keterangan saksi dapat di bacakan di muka persidangan padahal dalam asas ini keterangan saksi haruslah di jelaskan secara lisan di muka persidangan agar dapat diperoleh keterangan yang benar dari yang bersangkutan

²³ M. Yahya Harahap, *Op.Cit* , Hal, 113.

²⁴ Bambang Poernomo, 1985. *Pola Teori dan Asas Umum Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta, Liberty, Hal 79.

tanpa tekanan dari pihak manapun tetapi dalam hal ini hukum membolehkan hal tersebut. Jadi dalam hal ini saksi dapat tidak hadir sesuai dengan alasan- alasan yang terdapat dalam pasal 162 ayat 1 walaupun dalam hal ini hakim tidak dapat mengetahui secara langsung sorot mata, raut muka, maupun bahasa tubuh (*gestures*) yang ditunjukkan oleh seorang saksi di muka persidangan yang mana hal-hal tersebut dapat mempengaruhi keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan.

6. Asas Komunikasi Dengan Tanya Jawab Langsung

Asas ini memiliki prinsip yaitu menghendaki bahwa di dalam persidangan hakim, terdakwa, dan saksi berhubungan melalui pertanyaan langsung, lisan tanpa melalui perantara tidak pula dengan cara surat-menyurat.

Rusli Muhammad berpendapat bahwa :

“Semua pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa dan saksi harus diarahkan langsung dan semua pertanyaan yang muncul, baik dari jaksa penuntut umum maupun penasihat hukum juga melalui hakim, kemudian hakim meneruskan pertanyaan itu kepada terdakwa atau saksi.”²⁵

Dari kutipan diatas, menurut hemat penulis bahwa Tanya jawab langsung ditujukan untuk hakim dengan terdakwa dan saksi. untuk jaksa penuntut umum dan penasihat hukum apabila ingin bertanya kepada terdakwa ataupun saksi tidak boleh langsung, tetapi harus melalui hakim

²⁵ Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. Hal 36.

yang mana hakim nanti akan meneruskan pertanyaan itu kepada terdakwa ataupun saksi. Namun untuk jawaban yang diberikan oleh terdakwa atau saksi adalah jawaban yang langsung. Artinya mereka sendirilah yang menjawab pertanyaan-pertanyaan itu bukan hakim atau orang lain yang berada atau di luar persidangan. Jadi bila dikaitkan dengan keterangan saksi yang di bacakan di persidangan menurut hemat penulis memang tidak adanya proses Tanya jawab antara hakim dan saksi yang tidak hadir tersebut sehingga keteangannya di bacakan tetapi kesaksian yang dibacakan dapat di samakan kekuatannya dengan saksi yang hadir di persidangan sesuai pasal 162 ayat 2 Undang-undang Nomo 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

B. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian

B.1. Pengertian Pembuktian

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak memberikan pengertian mengenai pembuktian, namun pengertian pembuktian terdapat dalam kamus bahasa Indonesia dan pengertian para pakar.

Kata “pembuktian” berasal dari kata “bukti” yang artinya sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa, kemudian mendapat awalan “pem” dan akhiran “an”, jadi arti kata pembuktian adalah proses perbuatan, cara membuktikan sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa, begitu juga dengan pemngertian dari membuktikan yang awalan katanya adalah

“mem” dan akhiran katanya adalah “an”, artinya adalah memperlihatkan bukti, meyakinkan dengan bukti.²⁶

Sesuai kutipan diatas, menurut hemat penulis bahwa pembuktian merupakan aturan tentang bagaimana proses, perbuatan atau cara membuktikan sesuai undang-undang (KUHP). Kemudian pembuktian adalah perbuatan memberi, memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu sebagai bukti kebenaran, melaksanakan cita-cita dan sebagainya, menandakan atau menyatakan bahwa sesuatu benar serta meyakinkan, menyaksikan suatu peristiwa secara nyata, jadi disini penulis menyimpulkan bahwa pembuktian adalah seperangkat aturan tentang bagaimana proses memperlihatkan bukti di muka hakim.

Pembuktian yang merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian.²⁷

Banyak ahli hukum yang mendefinisikan pembuktian ini menggunakan makna kata membuktikan.

Menurut **Sudikno Mertokusumo**

“Membuktikan disebut dalam arti yuridis yaitu memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.”²⁸

Sedangkan menurut **Subekti**

²⁶ Dalam Kamus Bahasa Indonesia, 1990, Diterbitkan oleh Departemen P&K, Balai Pustaka. Jakarta. Hal 133.

²⁷ Hari Sasangka, Lily Rosita, 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju. Bandung. Hal. 10.

²⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty. Yogyakarta. Hal 35.

“Membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan”.²⁹

Jadi menurut penulis dari definisi tentang membuktikan dari kedua ahli hukum diatas adalah membuktikan dapat dikatakan sebagai proses dari penjelasan para pihak yang bersengketa yang mana penjelasan tersebut dapat meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang disampaikan oleh kedua belah pihak sehingga hakim dapat menyimpulkan siapa yang benar dan siapa yang salah atas perkara tersebut.

Hukum pembuktian bukanlah sistem yang teratur. Kuat atau lemahnya pembuktian tergantung pada kesesuaian antara fakta yang satu dengan fakta yang lain yang dapat dibuktikan dan diyatakan kepada hakim³⁰. Pasal-pasal KUHAP tentang pembuktian dalam pemeriksaan biasanya diatur dalam pasal 183 sampai dengan 191 (hal pembuktian ini di atur di dalam HIR diatur oleh pasal – pasal 293 sampai dengan 314). Dalam pasal 183 KUHAP yang berbunyi hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa bersalah melakukannya.³¹

Seperti diketahui, dalam pembuktian tidaklah mungkin dan dapat tercapai kebenaran mutlak (absolut). Semua pengetahuan kita hanya bersifat relatif, yang didasarkan pada pengalaman, penglihatan dan pemikiran yang tidak pasti selalu benar. Jika diharuskan adanya syarat kebenaran mutlak untuk dapat menghukum seseorang, maka tidak boleh sebagian besar pelaku tindak pidana pastilah dapat mengharapkan bebas dari penjatuan pidana. Satu-satunya yang dapat diisyaratkan dan yang sekarang dilakukan adalah adanya suatu kemungkinan besar bahwa terdakwa telah bersalah melakukan perbuatan-perbuatan yang dituduhkan, sedangkan ketidak-kesalahannya walaupun selalu ada kemungkinan, merupakan suatu hal yang tidak dapat diterima sama sekali.³²

²⁹ Subekti, 2001, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramitha. Jakarta. Hal 1.

³⁰ Eddy O.S. Hiariej, *Op.Cit.* Hal 14

³¹ Djoko Prakoso, *Op. Cit* Hal 36.

³² *Ibid*, Hal 37.

Jadi dapat dikatakan bahwa pembuktian dipergunakan apabila terjadinya sengketa dan perkara di muka persidangan, sehingga pembuktian itu hanya diperlukan dalam konteks apabila timbul perselisihan oleh pihak-pihak yang berperkara, seperti halnya keterangan saksi yang di bacakan dipersidangan.

B.2. Sistem Pembuktian

Sistem pembuktian adalah merupakan ketentuan tentang bagaimana cara dalam pembuktian dan patokan dalam menarik kesimpulan tentang terbukti apa yang dibuktikan, atau sistem pembuktian dapat disebut pula dengan teori atau ajaran pembuktian. Ada beberapa sistem pembuktian yang telah dikenal dalam doktrin hukum acara pidana, ialah:

a. Sistem Keyakinan belaka (*Conviction in Time*)

Menurut sistem ini, hakim dapat menyatakan telah terbukti kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan dengan didasarkan pada keyakinannya saja, dan tidak perlu mempertimbangkan dari mana (alat bukti) dia memperoleh dan alasan-alasan yang dipergunakan serta bagaimana caranya dalam membentuk keyakinannya tersebut. Juga tidak perlu mempertimbangkan apakah keyakinan yang dibentuknya itu logis ataukah tidak logis, bekerjanya sistem ini benar-benar bergantung kepada hati nurani hakim.³³

Sistem ini mengandung kelemahan yang besar. Sebagaimana manusia biasa, hakim bisa salah keyakinan yang telah dibentuknya, berhubung tidak ada kriteria, alat-alat bukti tertentu yang harus dipergunakan dan syarat serta cara-cara hakim dalam membentuk keyakinan itu. Disamping itu, pada sistem ini terbuka peluang yang besar untuk terjadi praktik penegakkan hukum yang sewenang-wenang, dengan

³³ *Ibid*, Hal 25

bertumpu pada alasan hakim telah yakin. Walaupun mengandung kelemahan yang besar, District dan Pengadilan Kabupaten³⁴

Kelemahan dari sistem ini terletak pada terlalu banyak memberikan kepercayaan kepada hakim, kepada kesan-kesan perseorangan sehingga sulit untuk melakukan pengawasan. Hal ini terjadi pada peradilan Prancis yang membuat pertimbangan berdasarkan metode ini, dan banyak mengakibatkan putusan bebas yang aneh.³⁵

Pada teori ini menurut hemat penulis bahwa sistem keyakinan belaka memberikan kebebasan terlalu besar kepada hakim sehingga susah untuk diawasi, selain itu terdakwa atau penasihat hukumnya terasa sulit untuk melakukan pembelaan. Dalam hal ini hakim dapat memidana terdakwa berdasarkan keyakinannya bahwa terdakwa telah melakukan apa yang didakwakan kepadanya, terlebih lagi menilai kebenaran dari keterangan saksi yang dibacakan menggunakan keyakinannya.

b. Sistem keyakinan dengan Alasan Logis (*Laconviction in Raisonne*)

Sistem ini lebih maju sedikit dari pada sistem yang pertama, walaupun keduanya didasarkan pada keyakinan dalam menarik hasil pembuktian. Mengapa sistem kedua ini lebih maju karena dalam hal membentuk dan menggunakan keyakinan hakim untuk menarik kesimpulan tentang terbuktinya kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana, didasarkan pada alasan-alasan yang logis. Walaupun alasan-alasan itu dengan menggunakan alat-alat bukti baik yang ada disebutkan dalam undang-undang maupun diluar undang-undang. Walaupun UU menyebutkan dan menyediakan alat-alat bukti, tetapi dalam hal menggunakannya dan menaruh kekuatan alat-alat bukti tersebut terserah pada pertimbangan hakim dalam hal membentuk keyakinannya dalam hal membentuk keyakinan hakim masuk akal, artinya dapat diterima oleh akal orang yang pada umumnya. Sistem ini

³⁴ Wirjono Prodjodikoro, 1985. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung. Bandung. Hal 110.

³⁵ Andi Hamzah, 1985. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, , Ghana Indonesia. Jakarta. Hal 241.

kadang disebut dengan sistem pembuktian keyakinan bebas (*vrije bewijstheorie*), karena dalam membentuk keyakinannya hakim bebas menggunakan alat-alat bukti dan ,menyebutkan alasan-alasan dari keyakinan yang diperolehnya dari alat-alat bukti tersebut.³⁶

Pada sistem keyakinan dengan alasan yang logis menurut hemat penulis hakim dapat memutus seseorang bersalah berdasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*Conclusie*) yang berlandaskan kepada peraturan – peraturan pembuktian, jadi apabila dikaikan dengan kesaksian yang dibacakan di muka persidangan hakim dalam hal memutus perkara, tidak hanya menggunakan keyakinannya tetapi juga harus menggunakan alasan yang logis walaupun pengetahuan dari hakim tersebutpun terbatas.

c. Sistem Pembuktian Melalui Undang-undang (*Positief Wettelijk Bewijstheorie*)

Terkadang sistem pembuktian ini disebut dengan sistem menurut undang-undang secara positif. Maksudnya, ialah dalam hal membuktikan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana didasarkan semata-mata pada alat-alat bukti serta cara-cara mempergunakannya yang telah ditentukan terlebih dulu dalam undang-undang. Apabila dalam hal membuktikan telah sesuai dengan apa yang telah ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang, baik mengenai alat-alat buktinya maupun cara–cara mempergunakannya, maka hakim harus menarik kesimpulan bahwa kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana telah terbukti. Keyakinan hakim sama sekali tidak penting dan bukan menjadi bahan yang boleh dipertimbangkan dalam hal menarik kesimpulan tentang kesalahan terdakwa melakukan

³⁶ Adami Chazawi, 2008. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, PT Alumni.Bandung.
Hal 26.

tindak pidana. Jadi sistem ini adalah sistem yang berlawanan dengan sistem pembuktian berdasarkan keyakinan semata-mata.³⁷

Pada sistem pembuktian melalui Undang-undang menurut hemat penulis bahwa sistem pembuktian ini lebih menitik beratkan pada prinsip penghukuman berdasarkan hukum atau peraturan. Artinya penjatuhan hukuman terhadap seseorang semata-mata tidak diletakkan di bawah kewenangan hakim, tetapi di atas kewenangan Undang-undang .

Seseorang akan di jatuhkan pidana atau hukuman jika apa yang didakwakan kepadanya memang berdasarkan cara dan alat bukti yang sah menurut undang-undang. Dalam teori ini Undang-undang menentukan bagaimana cara hakim untuk mempergunakan alat bukti tersebut sebagaimana mestinya, yang mana penggunaannya tersebut sesuai dengan yang telah di tentukan oleh undang-undang.

d. Sistem Pembuktian Menurut Undang-undang secara Terbatas (*Negatief Wettelijk Bewijstheorie*)

Menurut sistem ini, dalam hal membuktikan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hakim tidak sepenuhnya mengandalkan alat-alat bukti serta dengan cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang. Itu tidak cukup, tetapi harus juga disertai keyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana. Keyakinan yang dibentuk tersebut haruslah di dasarkan atas fakta-fakta yang diperoleh dari alat bukti yang ditentukan dalam undang-undang. Jadi, untuk menarik kesimpulan dari kegiatan pembuktian didasarkan pada dua hal, yakni alat-alat bukti dan keyakinan yang

³⁷ *Ibid*, Hal 27.

merupakan kesatuan tidak dipisahkan, yang tidak berdiri sendiri-sendiri.³⁸

Dari pengertian diatas penulis menyimpulkan bahwa sistem pembuktian ini memadukan dua teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim dan berdasarkan undang-undang . hal tersebut senada dengan pendapat **M. Yahya Harahap** yang menyatakan bahwa

“Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan keseimbangan antara kedua siste, yang saling bertolak belakang secara ekstrem. Dari keseimbangan tersebut, sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif menggabungkan ke dalam dirinya secara terpadu sistem pembuktian menurut keyakinan dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Dari hasil penggabungan kedua sistem dari yang saling bertolak belakang itu terwujud suatu sistem pembuktian menurut undang-undang secara negative. Dimana rumusnya bahwa salah tidaknya seseorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan pada cara dan dengan alat-alat yang sah menurut undang-undang.”³⁹

Berdasarkan kutipan diatas menurut hemat penulis bahwa KUHAP sendiri menganut teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif. Dengan tegas dasar pembuktian ini dinyatakan dalam pasal 183 KUHAP yang merumuskan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

³⁸ *Ibid*, Hal 28.

³⁹ M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, Hal 800.

Atas dasar ketentuan pasal 183 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) itu, maka penulis menyimpulkan bahwa KUHAP memakai sistem pembuktian menurut Undang-undang yang negatif. Dalam hal ini pembuktian harus dilakukan penelitian, apakah terdakwa cukup alasan yang didukung oleh pembuktian yang ditentukan oleh Undang-undang (minimal dua alat bukti) dan kalau ia cukup, maka baru dipersoalkan tentang ada atau tidaknya keyakinan akan kesalahan terdakwa berkaitan dengan kesaksian yang dibacakan di muka persidangan bahwa majelis hakim dalam memeriksa saksi harus mempertimbangkan berdasarkan keyakinannya

Berdasarkan pada 4 (empat) teori yang telah di paparkan diatas, penulis membuat kesimpulan bahwa sistem pembuktian hukum pidana di Indonesia merupakan sistem pembuktian secara negatif dimana yang dicari oleh hakim adalah kebenaran materil. Pembuktian secara negatif (*negatief wettelijk stelsel*) merupakan pembuktian di depan pengadilan agar suatu pidana dapat dijatuhkan oleh hakim, dan harus memenuhi dua syarat mutlak, yaitu alat bukti yang cukup dan keyakinan hakim.

C. Tinjauan Umum Tentang Saksi dan Keterangan Saksi

C. 1 Pengertian saksi

Saksi menurut pasal 1 ayat 26 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah orang

yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri

Menjadi saksi merupakan suatu kewajiban bagi setiap orang. Apabila orang tersebut menolak memberikan keterangannya padahal orang tersebut sudah dipanggil ke suatu sidang pengadilan maka ia dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku.⁴⁰

Keberadaan saksi dalam mengungkapkan sebuah tindak pidana sangat penting, karena dalam pasal 184 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) posisi keterangan saksi ada pada posisi yang pertama, sehingga bagi kalangan aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan perkara tindak pidana selalu berusaha mendapatkan keterangan saksi sebagai alat bukti yang paling penting , oleh karena itu pentingnya keterangan saksi, maka sudah selayaknya seorang saksi mendapat perlakuan khusus.⁴¹

Seorang saksi adalah seorang manusia belaka atau manusia biasa. Ia dapat dengan sengaja bohong, dan dapat juga jujur menceritakan hal sesuatu, seolah-olah hal yang benar, akan tetapi sebetulnya tidak benar. Seseorang saksi harus menceritakan hal yang sudah lampau dan tergantung dari daya ingat dari orang perorang, apa itu dapat dipercaya atas kebenarannya.⁴²

⁴⁰ Mohammad Taufik Makaro dan Suhasril, 2010. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia. Bogor, Hal 107.

⁴¹ Muhadir, Edi dan Husni, 2010. *Perlindungan saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, ITS Press. Surabaya. Hal 25.

⁴² Wirjono Prodjodikoro, 1970, *Hukum Acara Pidana di indonesia*, PT Sumur, Bandung, Hlm. 7

Saksi merupakan orang yang memberi keterangan di muka hakim untuk kepentingan terdakwa maupun korban dalam proses persidangan. Kemudian saksi yang pertama didengar keterangannya oleh hakim adalah korban yang menjadi saksi. Pasal 160 ayat 1 huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Saksi korban adalah orang yang dirugikan akibat terjadi kejahatan atau pelanggaran akibat suatu tindak pidana.

Akan tetapi tidak menutup kemungkinan saksi lain didengar keterangannya terlebih dahulu. Saksi ini diharapkan dalam proses acara pidana adalah saksi yang ia mendengar, ia mengalami, dan ia melihat dengan mata kepala sendiri dan bukan saksi yang ia mendengar atau memperoleh keterangan dari orang lain. Selain itu juga saksi harus mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agama atau kepercayaannya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya.

Untuk menjadi saksi syaratnya adalah :

1. Syarat objektif saksi

- a. Dewasa telah berumur 15 tahun / sudah kawin
- b. Berakal sehat
- c. Tidak ada hubungan keluarga baik hubungan pertalian darah / perkawinan dengan terdakwa

2. Syarat subjektif saksi

Mengetahui secara langsung terjadinya tindak pidana dengan melihat, mendengar, merasakan sendiri.

3. Syarat formil

Saksi harus disumpah menurut agamanya.⁴³

Pada dasarnya semua orang dapat menjadi saksi, akan tetapi pada pasal 168 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur tentang pengecualian seseorang menjadi saksi yakni :

1. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai Pihak-pihak yang disebutkan diatas dalam pasal 168 KUHAP disebut dengan relatif tidak berwenang (*relative onbevoegd*) untuk memberi kesaksian, karena jika jaksa, terdakwa dan pihak-pihak yang di sebutkan dalam pasal 168 KUHAP, maka mereka dapat didengar sebagai saksi sesuai dengan penjelasan pasal 169 ayat (1) KUHAP. Dan apabila ketiga pihak tersebut tidak setuju untuk memberi kesaksian, hakim masih bisa memutuskan untuk mendengar mereka tetapi tidak sebagai saksi, terdakwa.
2. Saudara dan terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dari anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.

⁴³ Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm 78.

3. Suami atau isteri terdakwa meskipun sudah berceari atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

melainkan hanya untuk memberikan keterangan (*inlichtengen*) saja , artinya tidak disumpah⁴⁴

Jadi dapat disimpulkan bahwa pasal 168 dan 169 KUHAP menentukan empat (4) hal sebagai berikut:

- a. Mereka tidak mungkin dapat dipaksa untuk bersumpah atau memberikan keterangan sebagai saksi, tetapi mereka harus hadir, kalau dipanggil menghadap di pengadilan.
- b. Jika mereka tidak bersedia hadir untuk memberikan kesaksian, maka hakim tidak boleh mendengar mereka diatas sumpah, tetapi hanya memberikan keterangan.
- c. Jika mereka dengan terdakwa serta jaksa sama-sama menyetujui, mereka dapat didengarsebagai saksi di atas sumpah, persetujuan mereka tersebut harus dinyatakan dalam berita acara persidangan.
- d. Tanpa persetujuan terdakwa, jaksa dan mereka yang tersebut dalam pasal tersebut diatas, hakim dapat memerintahkan untuk mendengar mereka tidak diatas sumpah.⁴⁵

Dari beberapa penjelasan diatas menurut hemat penulis bahwa saksi mempunyai peran penting dalam proses persidangan di pengadilan guna memberikan keterangan tentang apa yang ia lihat, ia dengar, dan ia alami sendiri di hadapan hakim, karena saksilah yang mengetahui secara konkrit mengenai suatu tindak pidana yang di dakwakan oleh terdakwa.

Saksi yang mempunyai peran dan fungsi yang sangat penting, karena

22 ⁴⁴A. Karim Nasution , 1975, *Masalah Hukum Pembuktian Dalam Proses Pidana*, Jakarta, Hal

⁴⁵ *Ibid*

tujuan dari menanyakan saksi adalah memberikan penjelasan apakah terdakwa terbukti bersalah atau tidak, dan di dukung pula dengan keabsahannya menjadi seorang saksi sesuai dengan syarat-syarat diatas agar dapat menguatkan keterangannya itu. Tanpa adanya saksi, suatu tindak pidana akan sulit diungkap kebenarannya. Maksud menanyakan saksi adalah memberikan kesempatan untuk menyatakan bahwa tersangka tidak bersalah ataupun jika bersalah mengakui kesalahannya.

C.2. Pengertian Keterangan Saksi.

Keterangan saksi terdapat dalam urutan pertama dari beberapa Alat bukti yang terdapat dalam pasal 184 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), adapun pengertiannya yang di atur dalam pasal 1 Butir 27 KUHAP keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri denga menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu.

Berdasarkan perumusan diatas, maka dalam keteranga saksi, hal yang harus diungkapkan di depan sidang pengadilan adalah :

1. Yang ia dengar sendiri, bukan hasil cerita atau hasil pendengaran dari orang lain. Saksi secara pribadi harus mendengar langsung peristiwa pidana atau yang kejadian yang terkait dengan peristiwa pidana tersebut

2. Yang ia lihat sendiri, kejadian tersebut benar-benar disaksikan langsung dengan mata kepala sendiri oleh saksi baik secara keseluruhan ataupun rentetan, fragmentasi peristiwa pidana yang diperiksa.
3. Yang ia alami sendiri sehubungan dengan perkara yang sedang diperiksa, biasanya merupakan korban dan menjadi saksi utama dari peristiwa pidana yang bersangkutan. Pasal 160 Ayat (1) huruf b menyatakan bahwa yang pertama kali didengar adalah saksi korban.
4. Didukung oleh sumber dan alasan dari pengetahuannya itu, sehubungan dengan peristiwa, keadaan, kejadian yang didengar, dilihat, dan atau dialaminya. Setiap unsur keterangan harus diuji kebenarannya. Antara keterangan saksi dan sumbernya harus benarbenar konsisten satu dengan yang lainnya.

Menurut Hilman Nugroho mengatakan bahwa

“Dalam KUHAP saat ini pun keterangan saksi menduduki peringkat pertama sebagai salah satu alat bukti dalam proses perkara pidana. Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti terpenting dalam perkara tindak pidana, oleh karenanya hukum acara pidana yang mngutamakan kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang mendekati kenyataan sebagaimana yang menjadi tujuan utama KUHAP”

Berdasarkan kutipan diatas, penulis menyimpulkan bahwa keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam KUHAP. Tidak ada yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. sebab sesuai dari definisi yang sudah dijelaskan pada sub-sub iniyang dpat dianggap saksi yaitu dia yang

melihat, mendengar dan mengalami sendiri guna memberikan keterangan di pengadilan.

Syarat keterangan saksi agar keterangannya itu menjadi sah dan berharga, sehingga dapat digunakan sebagai salah satu dasar pertimbangan hakim dalam hal membentuk keyakinannya dapat terletak pada beberapa hal, ialah:

- a. Hal kualitas pribadi saksi.
- b. Hal apa yang diterangkan saksi.
- c. Hal sebab apa saksi mengetahui tentang sesuatu yang ia terangkan.
- d. Syarat sumpah atau janji.
- e. Syarat mengenai adanya hubungan antara isi keterangan saksi dengan isi keterangan saksi lain atau isi alat bukti lain.⁴⁶

Syarat keterangan saksi yang dimaksud diatas ini merupakan syarat keterangan saksi yang diberikan dimuka sidang pengadilan, bukan saat memberikan keterangan pada tahap penyidikan. Keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah juga terletak pada keterangan itu diberikan dimuka persidangan. Akan tetapi bagi penyidik syarat- syarat mengenai beberapa hal tersebut diatas, terutama syarat yang relevan, sebagai contoh syarat mengenai kualitas pribadi saksi haruslah diperhatikan, agar menetapkan seorang saksi dan pekerjaan memberkasnya dalam berkas perkara pidana tidak menjadi sia-sia kelak disidang pengadilan.⁴⁷

Berkaitan dengan keterangan saksi yang dibacakan di muka persidangan , menurut hemat penulis bahwa saksi dalam memberikan keterangannya walaupun dengan keterangan pada tahap penyidikan selama tidak bertentangan dengan undang-undang dan sudah di sumpah terlebih dahulu keterangan yang diberikan tatap sah sesuai pasal 162 ayat 2 KUHAP. Sebab keterangan saksi dalam kedudukannya sebagai alat bukti bertujuan untuk membuat terang suatu perkara pidana yang sedang diperiksa di harapkan dapat menambah timbulnya

⁴⁶ Adami Chazawi, Op. Cit, Hal 40

⁴⁷ Adami Chazawi, Op. Cit Hal 40

keyakinan hakim, bahwa suatu tindak pidana itu benar-benar terjadi dan terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut.

D. Tinjauan Umum Tentang Hakim

D.1 Pengertian Hakim

Menurut pasal 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara pidana hakim adalah pejabat Peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.

Dalam Pandangan kenegaraan maupun kemasyarakatan, hakim senantiasa ditempatkan pada posisi sentral dalam penegakan hukumnya, semuanya bersumber pada hakim, sehingga kedudukan dan tanggung jawab tersebut sungguh berat secara manusiawi. Dalam rangka menjamin hakim yang sentral dan maha penting itu maka diperlukan berbagai kondisi dan persyaratan yang harus ada, melekat atau dilekatkan pada hakim, seperti jaminan kebebasan hakim, kedudukan hukuman atau syarat – syarat pengetahuan.⁴⁸

Hakim berfungsi pula untuk mengisi dan memperbaiki undang-undang yang dibuat untuk kurun waktu tertentu, dan diuji oleh zamanya. Hakim juga menengok pada ketentuan-ketentuan yang tertulis, guna mendapatkan hukum dan keadilan yang berdiri tegak diatas kepastian hukum. Oleh karena itu, polemik keadilan harus dirasakan oleh hakim melalui hati nurani yang adil, jujur, bersih dan keputusannya melampaui zamannya sehingga dapat dirasakan dalam kajian generasi hukum selanjutnya serta tidak menafikan pembuktian rasional yang diyakini kebenarannya.⁴⁹

Tugas hakim adalah memberi keputusan dalam setiap perkara atau konflik yang dihadapkan kepadanya. Penetapan hal-hal yang berhubungan dengan hukum, nilai hukum dari perilaku, serta kedudukan hukum pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara juga harus diperhatikan, sehingga dapat menyelesaikan perselisihan atau konflik secara inparsial berdasarkan hukum yang berlaku. Dengan demikian hakim harus selalu mandiri dan

⁴⁸ Syaiful Bahri, 2012 *Beban Pembuktian Dalam Beberapa Praktik Peradilan*. Gramatha. Jakarta Publihsing Hal 4.

⁴⁹ *Ibid* Hal. 5.

bebas dari segala pengaruh dari pihak manapun, terutama dalam mengambil suatu keputusan.⁵⁰

Mengenai apa yang menjadi tugas dari para Hakim tersebut khususnya berkenaan dengan perkara-perkara pidana, oleh A. Karim Nasution diberikan penjelasan bahwa,

“Dalam memeriksa suatu perkara pidana di muka Pengadilan, tugas Hakim adalah untuk mencari dan menemukan kebenaran, yaitu bahwa tindak pidana yang dituduhkan terhadap terdakwa benar-benar telah terjadi dan ia dapat dipersalahkan melakukan perbuatan itu”.⁵¹

Sebagaimana penjelasan di atas, Hakim mempunyai tugas yangmana tugas tersebut untuk mencari dan menemukan kebenaran. Kebenaran tersebut adalah bahwa tindak pidana yang dituduhkan terhadap terdakwa tertentu benar-benar telah terjadi dan adanya perbuatan aktif dari terdakwa yangmana perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan bahwa terdakwa tersebut dapat dipersalahkan sebagai orang yang telah melakukan perbuatan itu.

Dalam perkara pidana, pemeriksaan yang dilakukan Hakim hanya melulu ditujukan untuk memperoleh kebenaran yang riil, atau kebenaran materiil, yang tidak tergantung pada hal-hal yang dikemukakan oleh pihak-pihak yang berperkara, tetapi kebenaran dengan tujuan yang tertentu, tujuan mana adalah termasuk sebagai salah satu yang terpenting dari tugas-tugas kekuasaan negara, yaitu menjatuhkan hukuman atau pembebasan karena tidak bersalah dalam suatu perkara pidana.⁵²

Jadi disini bahwa fungsi dan tugas hakim yaitu memberikan putusan perkara yang telah dihadapkan kepadanya, hakim mempunyai peranan sangat

⁵⁰ *Ibid* Hal 5.

⁵¹ A. Karim Nasution, 1976, *Masaalah Hukum Pembuktian dalam Proses Pidana, I*, Jakarta, Hal. 18-19

⁵² *Ibid*, Hal 19

penting dalam proses pembuktian bahwa seseorang tersebut salah telah melakukan tindak pidana tersebut. Dalam setiap mengambil keputusan hakim harus mempunyai hati nurani yang jujur dan adil dan tidak terpengaruh dari pihak manapun.

D.2 Keyakinan Hakim

Pengertian keyakinan hakim tidak diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) walaupun mempunyai peranan yang signifikan.

Dalam hal ini dapat diartikan bahwa penyusunan KUHAP menyerahkan peran dan fungsi keyakinan hakim, agar dalam melaksanakan tugas dan wewenang mengadili, hakim wajib dengan sungguh-sungguh mendasarkan putusannya pada asas bebas, jujur dan tidak memihak.⁵³

Pembuktian yang dianut KUHAP adalah pembuktian berdasarkan Undang-undang yang menentukan tentang jenis dan banyaknya alat bukti yang harus ada. Pembuktian tersebut juga negatif karena adanya jenis-jenis lain dan banyaknya alat bukti yang ditentukan oleh Undang-undang itu belum dapat membuat hakim menjatuhkan pidana bagi seseorang terdakwa. Jenis-jenis dan banyaknya alat-alat bukti itu belum dapat menimbulkan keyakinan pada dirinya, bahkan terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut.⁵⁴

Untuk menjatuhkan hukuman diisyaratkan terpenuhi dua syarat yaitu:

1. Alat-alat bukti yang sah (*wettige bewijsmiddelen*)

⁵³ Kuffal, 2005. *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*, Cetakkan Ke X UMM Press. Malang Hal 38.

⁵⁴ Syaiful Bakhri, *Op.Cit*, Hal 88.

2. Keyakinan hakim (*Overtuiging des rechters*).

Pada pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Dijelaskan pula di dalam Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dalam pasal 6 yang berbunyi:

“Tidak seorangpun dapat dijatuhkan pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”.

Artinya seseorang dapat dijatuhkan pidana apabila sudah ada bukti seseorang tersebut telah melakukan tindak pidana dan bukti tersebut dapat menimbulkan keyakinan hakim bahwa orang itu salah maka dia bisa bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, Jadi, meskipun di dalam persidangan telah diajukan dua alat bukti atau lebih, apabila hakim tidak yakin bahwa hakim bersalah, terdakwa tersebut akan dibebaskan.

Jadi dalam perkara pidana untuk menjatuhkan hukuman diperlukan keyakinan hakim, oleh karena itu maka tidaklah mungkin dapat diberi kekuatan bukti yang sempurna terhadap suatu alat bukti, terlebih-lebih tidak kekuatan pembuktian yang memaksa (*dwingende bewijskracht*) berbeda dengan perkara perdata yangmana hakim dapat memberi kekuatan bukti yang kurang nilainya kepada suatu alat bukti sesuai dengan keinginannya, ataupun tidak memberi kekuatan bukti sama sekali jika ia tidak yakin.⁵⁵

Haruslah diingat bahwa keyakinan hakim tersebut bukanlah timbul dengan sendirinya saja, tetapi haruslah timbul dari alat-alat bukti yang sah yang

⁵⁵ Djoko Prakoso, *Op.Cit.* Hal 47

terdapat dalam Undang-undang, dan tidak dari keadaan-keadaan lain. Tidaklah dapat dipertanggungjawabkan suatu putusan yang walaupun sudah cukup alat-alat bukti yang sah, hakim dengan begitu saja menyatakan bahwa ia tidak yakin, dan karena itu ia membebaskan terdakwa, tanpa menjelaskan lebih jauh apa sebab-sebabnya dari ketidak yakinannya tersebut.⁵⁶

Seperti dijelaskan diatas menurut pasal 184 ayat (1) KUHAP hakim harus berpegang pada 5 macam alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Alat-alat bukti tersebut secara terpisah ataupun disatukan bersama-sama, dapat dipergunakan untuk menetapkan keyakinan hakim, sejauh mereka dapat disesuaikan satu sama lain. Dengan demikian, bukti yang sah yang terdiri dari macam yang berbeda disatukan satu sama lain, ataupun dengan alat-alat bukti yang sah menurut macam yang sama.⁵⁷

Menurut hemat penulis bahwa keyakinan hakim itu harus berdiri diatas asas kebebasan, kejujuran dan ketidak berpihakkan. Terlebih-lebih keyakinan pada putusan yang saksinya tidak dapat hadir dalam persidangan dan keterangan saksi pada tahap penyidikan di sumpah. Berkaitan dengan keyakinan hakim tersebut secara umum masyarakat mengenal ada tiga macam keyakinan yaitu *ainul yakin* yang artinya adalah keinginan yang diperoleh dengan menyaksikan secara langsung misalnya melihat hujan dengan mata kepala sendiri secara langsung, selanjutnya *haqul yakin* yang artinya adalah keyakinan yang diperoleh karena mengalami atau merasakan aensiri secara langsung misalnya

⁵⁶ Djoko Prakoso, *Op.Cit*, Hal 38.

⁵⁷ Djoko Prakoso, *Op.Cit*, Hal 47.

merasalakan air hujan yang membasahi tubuhnya dan yang terakhir ilmun yakin yang artinya adalah keyakinan yang diperoleh ilmu pengetahuan.

Pada dasarnya KUHAP tidak mengatur mengenai keterkaitannya keyakinan hakim dengan pengertian keyakinan pada umumnya telah dikenal dikalangan masyarakat.⁵⁸



⁵⁸ Kuffa, *Op,Cit.*Hal 38